

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi Di PT. PEGADAIAN

Oleh : Mohammad Nur Syarif Hidayat, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
dan Abshoril Fithry, S.H., M.H

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang, yang mana menjadi tantangan tersendiri untuk berusaha memperbaiki efektifitas suatu negara yaitu dengan pembangunan nasional. Perkembangan perekonomian saat ini merupakan bentuk sarana dalam menjadi titik fokus utama. Pegadaian hadir di tengah masyarakat untuk menjawab persoalan tersebut. Namun pada kenyataannya dalam praktek di Pegadaian dapat terjadi wanprestasi dan terdapat kekosongan hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengaturnya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang wanprestasi serta bagaimana prosedur lelang di PT. Pegadaian.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini yakni dengan kepustakaan dari semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menganalisis, dari analisis yang dilakukan oleh penulis dikumpulkan kemudian disimpulkan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bentuk perlindungan nasabah yang wanprestasi yaitu berupa somasi sebelum dilakukan lelang serta apabila ada uang kelebihan akan diberitahukan kepada nasabah dan prosedur lelang di PT. Pegadaian yaitu barang nasabah tersebut akan dilelang di muka umum.

Saran penulis terkait “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Wanprestasi di PT. Pegadaian” yaitu dalam aturannya, pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional sendiri, bukan menggunakan peraturan yang lama lagi. Karena masalah yang timbul dari adanya perjanjian gadai semakin lama akan semakin berkembang, sehingga harus ada peraturan nasional yang baru untuk menghadapi permasalahan yang akan ada dimasa mendatang.

Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gadai

ABSTRACT

Legal Protection for Customers in Case of Default in PT. PEGADAIAN

By : Mohammad Nur Syarif Hidayat, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
and Abshoril Fithry, S.H., M.H

Indonesia is one of the developing countries, which is a challenge in itself to try to improve the effectiveness of a country, namely national development. The current economic development is a means of becoming the main focal point. Pegadaian is present in the community to answer these problems. But in reality, in practice at Pegadaian, default can occur and there is a legal vacuum so that a rule is needed to regulate it.

The problem in this research is how the form of legal protection for customers who are in default and how is the auction procedure at PT. Pegadaian. With the aim of research to analyze and find out the legal protection for customers who are in default and how the auction procedure at PT. Pegadaian.

This type of research can be classified as normative research. In this study using a statutory approach. The data used in this study consisted of two legal materials, namely primary and secondary legal materials. The method used by the author in this paper is the library of all legal materials that have been collected then processing the legal materials by analyzing, from the analysis carried out by the authors collected and then concluded.

From the research results, it can be seen that the form of customer protection in default is in the form of a summons before the auction and if there is excess money, it will be notified to the customer and the auction procedure at PT. Pegadaian, namely the customer's goods will be auctioned in public.

The author's advice regarding "Legal Protection against Defaulting Customers at PT. Pegadaian", namely in its rules, the government makes its own national legislation, not using the old regulations. Because the problems that arise from the existence of a pawn agreement will grow over time, so there must be a new national regulation to deal with problems that will exist in the future.

Keywords: Agreement, Failure, Pawn